

IMPLEMENTASI PROGRAM “TERMINAL DARAH” DI PUSKESMAS PABENTENGANG KABUPATEN BANTAENG

Ika Saputri^{1*}, Andi Rosdianti Razak², Anwar Parawangi³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

This study used qualitative research. Data collection techniques used observation, interviews, documentation. Research data analysis techniques through the stages of data reduction, data presentation and conclusions. The results of this study showed that the implementation of the blood Terminal program at Pa'bentengang Public health center, Bantaeng Regency could be seen from four variables, namely communication, Resources, Disposition/attitude of the executor and bureaucratic structure. Thus, it has a problem in implementing the blood terminal because lack of communication or socialization to the public. Therefore, regarding the implementing, they had to be more frequent socialization actions, especially socialization to the rural community.

Keywords: *implementation, blood terminal, health*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Terminal Darah yang dilaksanakan oleh Puskesmas Pa'bentengang Kabupaten Bantaeng. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, Dokumentasi. Teknik analisis data penelitian melalui tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Program Terminal Darah di Puskesmas Pa'bentengang Kabupaten Bantaeng yang dapat dilihat dari empat variabel yaitu Komunikasi, Sumber daya, Disposisi/sikap pelaksana dan Struktur Birokrasi. Dengan demikian yang masih menjadi masalah dalam pelaksanaan terminal darah ini mengenai komunikasi atau tindakan sosialisasinya masih kurang kepada masyarakat. Maka dari itu, mengenai pihak pelaksana harus lebih sering melakukan tindakan sosialisasi terutama sosialisasi ke bagian masyarakat pedesaan.

Kata kunci: *implementasi, terminal darah, kesehatan*

* ikasaputri@gmail.com

PENDAHULUAN

Kesehatan adalah bagian penting yang paling berharga bagi manusia dan semua orang mendambakan hidup sehat. Kesehatan yaitu salah satu faktor penting untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Oleh sebab itu kesehatan tidak boleh diremehkan dengan siapa pun karena tidak ada seseorang yang menginginkan untuk sakit, baik itu secara rohani maupun jasmaninya.

Terciptanya masyarakat yang sehat merupakan impian setiap pemerintah daerah karena itu sebagai bagian dari tanggungjawab dan perannya selaku fasilitator terhadap masyarakat. Oleh sebab itu, kesehatan merupakan salah satu prioritas utama mereka untuk tujuan tercapainya program-program dalam pembangunan, sebagai upaya untuk menciptakan masyarakat yang sehat baik fisik maupun rohaninya.

Adapun salah satu program yang dikeluarkan dinas kesehatan Kabupaten Bantaeng adalah program terminal darah, dan ini dilakukan guna untuk merealisasikan hak atas kesehatan setinggi-tingginya adalah pelayanan darah. Pelayanan darah merupakan upaya kesehatan yang memanfaatkan darah manusia, sebagai bahan dasar dalam rangka penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan, pelayanan

darah dilakukan dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial, karena darah dilarang diperjual belikan dengan dalih apapun. Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan darah, dibutuhkan darah yang diperoleh dari sipendonor darah yang sukarela, sehat dan dapat memenuhi kriteria, seleksi sipendonor darah tersebut. Ketersediaan darah untuk ibu melahirkan merupakan hal yang paling penting karena kebutuhan untuk transfusi darah dapat terjadi kapan saja, seperti adanya ibu melahirkan yang kekurangan darah yang saat ini membutuhkan darah, dan juga dapat dilihat angka kematian ibu di Indonesia cukup tinggi dan apabila program ini tidak dijalankan maka dampaknya kematian ibu semakin meningkat. Maka dari itu, pemerintah di Kabupaten Bantaeng akan terus lakukan inovasi di Sektor Kesehatan untuk mencegah terjadinya kematian ibu yang diakibatkan pendarahan. Salah satunya adalah menerapkan program tentang terminal darah di Puskesmas termasuk Puskesmas Pa'benteng untuk ibu melahirkan.

Penyelenggaraan donor darah merupakan kerja sama di unit transfusi darah rumah sakit (UTDRS), dengan Puskesmas dan pelaksanaannya dilakukan di Puskesmas salah satunya

termasuk Puskesmas Pa'bentengan Kabupaten Bantaeng. Adapun mekanisme kerja terminal darah dimana yang dulunya donor darah itu dilakukan di Rumah Sakit sekarang dipindahkan ke Puskesmas agar supaya jarak masyarakat dekat dan mudah untuk diakses sehingga tingkat partisipasi masyarakat untuk mendonorkan darahnya lebih besar. Dan adapun terkait peraturan menurut, Undang-undang Nomor 36, Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan pemerintah Nomor 7 tahun 2011 tentang pelayanan darah. selanjutnya, Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 59 Tahun 2016 mengenai kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Dinas kesehatan, dan surat keputusan Bupati No.430/336/V/2017 Tentang pembentukan Terminal Darah pada fasilitas Kesehatan Kabupaten Bantaeng.

Program terminal darah ini dilaksanakan di Puskesmas Pa'bentengan Kabupaten Bantaeng merupakan program yang telah dijalankan sejak tahun 2017, Terminal darah di Puskesmas ini bertujuan menjamin ketersediaan stok darah bagi ibu bersalin. hadirnya stok darah di Puskesmas, dapat memberikan rasa aman bagi calon ibu bersalin, apabila dalam proses melahirkan terjadi

pendarahan dan membutuhkan darah secepatnya. Dalam dua tahun terakhir ini, mampu memberikan berbagai kontribusi positif dalam hal akselerasi pencapaian program kesehatan.

Salah satunya adalah kebijakan program terminal darah yang dijalankan secara intensif dan berkesinambungan sebagai salah satu cara untuk menciptakan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat, khususnya pada ibu yang melahirkan. Adapun permasalahan terkait ketersediaan darah untuk ibu yang melahirkan yang sedang kekurangan darah adalah disebabkan karena masih kurangnya bersosialisasi langsung kepada masyarakat sehingga kesadaran masyarakat masih kurang untuk ikut berpartisipasi dalam mendonorkan darahnya.

Maka dari itu mengenai pelaksanaan kebijakan ini. Terkait perspektif untuk menganalisis permasalahan kebijakan menurut Edward III (1980), implementasi kebijakan dibutuhkan karena adanya suatu masalah kebijakan yang harus diselesaikan untuk mencapai sasaran dan untuk mengetahui dalam menentukan faktor keberhasilan dalam implementasi kebijakan ada beberapa indikator yaitu: 1) Komunikasi 2) Sumber daya 3) Disposisi 4) Struktur

birokrasi. Menurut Mulyadi (2016), bahwa implementasi mengacu pada suatu tindakan untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan dalam suatu keputusan. Sedangkan menurut Van Meter dan Van Horn dalam Suratman, (2017); mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang akan dilaksanakan baik yang dilakukan sendiri maupun secara berkelompok, dan baik pemerintahan ataupun swasta yang mengarahkan dalam mencapai tujuan yang sudah ditentukan dalam hasil kebijaksanaan.

Menurut Nugroho (2006). Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. implementasi adalah memahami apa yang sebenarnya yang akan terjadi dalam suatu program yang dinyatakan berlaku dan dirumuskan adalah fokus perhatian implementasi kebijakan yaitu kejadian dalam kegiatan yang timbul setelah disahkan. pedoman-pedoman kebijakan pemerintah yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan dampak/akibat nyata pada masyarakat. Oleh karena itu untuk mencapai keberhasilan dari implementasi ini, perlu kesamaan dalam pandangan atas tujuan yang ingin dicapai dan komitmen semua pihak

untuk memberikan dukungan bagi pelaksanaan program yang dikeluarkan oleh pemerintah, supaya bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Implementasi merupakan suatu proses yang dimana pelaksanaan kebijakan melaksanakan suatu aktivitas dalam kegiatan, sehingga akhirnya bisa mendapatkan hasil yang sesuai dengan sasaran atau tujuan kebijakan tersebut. Berhasilnya suatu implementasi kebijakan dapat dilihat antara pelaksanaan atau penerapan dalam kebijakan dengan desain sasaran dan tujuan kebijakan itu sendiri, maka dari itu bisa memberikan hasil yang positif dalam pemecahan masalah yang dihadapi.

Adapun beberapa pengertian implementasi kebijakan publik menurut para ahli sebagai berikut: a) Salusu (2002), implementasi adalah seperangkat kegiatan yang dilakukan menyusun satu keputusan. Suatu keputusan selalu dimaksudkan untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai. Guna untuk merealisasikan dalam mencapai sasaran dan diperlukan serangkaian aktivitas. Maka dari itu kesimpulan implementasi yaitu berbagai aktivitas dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dilaksanakan dalam program yang dikeluarkan oleh pemerintah. b) Ripley dan Franklin

dalam Winarno (2011), mengemukakan bahwa implementasi merupakan masalah yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan dan yang memberikan suatu program, kebijakan, keuntungan dalam suatu jenis keluaran yang nyata dalam kebijakan. c) Bardack dalam Agustino (2006), mengatakan bahwa implementasi merupakan sebuah pembuatan atau mengeluarkan suatu program atau kebijakan umum yang dapat dilihat bagus diatas kertas, namun sulit merumuskan dalam sebuah kata-kata dan mengenakan ditelinga-telinga masyarakat atau pemimpin dan bahkan lebih sulit lagi dalam proses pelaksanaannya, dengan bentuk untuk memuaskan masyarakat. c) Purwanto (2012), mengatakan bahwa dalam proses implementasi bukanlah hal yang mudah. Akan tetapi proses tersebut bukan hanya aktivitas administrasi semata tetapi yaitu sebagai makna dan fungsi dalam pembangian kerja, atau pelaksanaan untuk memberikan perintah atau pengawasan dalam suatu pekerjaan sering disebut sebagai problem atau control. namun kenyataan yang sesungguhnya dalam proses implementasi melibatkan berbagai elemen, seperti kapasitas organisasi, kualitas kebijakan yang diberikan mandat dalam mengimplementasikan kebijakan atau kemampuan sumber

daya manusia yang ditugaskan dalam mengimplementasikan kebijakan, ketepatan dan instrument dalam mencapai suatu tujuan kebijakan. d) Aneta (2010) mengatakan bahwa, implementasi kebijakan publik adalah salah satu aktivitas dalam suatu proses kebijakan, yang menentukan apakah sebuah kebijakan bersentuhan dengan kepentingan dan dapat diterima dengan publik. Oleh karena itu dapat ditekankan dalam tahap perencanaan dan formulasi kebijakan yang dilakukan dengan sebaik-baiknya, maka tahapan implementasi apabila tidak diperhatikan dengan optimal maka tidak akan jelas yang diharapkan dari sebuah kebijakan tersebut. Adapun Model proses Implementasi Edwards III Menurut pandangan George C. Edward, dalam Mustari (2015) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu: 1) Komunikasi, yaitu sebagai penentuan dalam pencapaian keberhasilan implementasi dengan masyaratkan agar implementator dapat mengetahui apa yang harus dilakukan atau dikerjakan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan dengan demikian harus dikomunikasikan terlebih dahulu secara tepat dengan peaksana agar program implementasi dapat berjalan efektif dan juga yang bertanggungjawab untuk melaksanakan sebuah keputusan

harus mengetahui dan juga konsistensi apakah mereka bisa melakukannya. 2) Sumber daya, merupakan hal yang penting dalam implementasi yang baik, jelas dan konsisten, apabila implementator kekurangan sumber daya untuk menjalankan suatu kebijakan atau program maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Adapun komponen sumber daya yaitu meliputi jumlah staf, keahlian dari pelaksana, dan juga fasilitas-fasilitas pendukung yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

Informasi merupakan sumber daya yang penting bagi pelaksana dalam suatu kebijakan. Dengan demikian terdapat dua bentuk informasi yaitu: a) Informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan program atau kebijakan serta bagi pelaksana harus mengetahui apa yang harus dilakukan. b) Informasi tentang data pendukung kepatuhan kepada peraturan pemerintah dan undang-undang. c) Disposisi atau sikap, yaitu berkenaan dengan kesediaan dari implementator yang dapat menjalankan kebijakan dengan baik, kecakapan saja tidak mencukupi tanpa kesediaan komitmen seperti apa yang diinginkan oleh yang mengeluarkan dan yang melaksanakan kebijakan tersebut. jika implementor setuju dengan bagian-

bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pendapat mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. d) Struktur birokrasi, yaitu susunan komponen unit-unit kerja maka dari itu organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja dan adanya kejelasan tentang fungsi atau kegiatan yang beda sebagaimana mereka dapat melakukan atau melaksanakan tugas yang sudah ditentukan masing-masing. Selain itu, struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung lemah dalam pengawasan seperti, prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan organisasi fleksibel. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terlaksana atau tidaknya kebijakan publik Menurut Agustino (2006) sebagai berikut: 1) Faktor pendukung dalam pemenuhan kebijakan: a) Pedulinya masyarakat pada keputusan pemerintah. b) Adanya kesadaran dalam menerima kebijakan. c) Adanya sanksi hukum. d) Adanya kepentingan public. e) Kepentingan pribadi. f) Adanya masalah waktu. 2) Faktor penolakan/menunda kebijakan: a) Terdapat kebijakan yang

bertantangan b) Tidak adanya kepastian hukum. c) Terdapat ketidakpatuhan terhadap hukum. d) Terdapat keanggotaan dalam organisasi.

METODE PENELITIAN

Waktu penelitian dilaksanakan selama dua bulan mulai tanggal 07 Juli sampai tanggal 07 September 2020 dan adapun lokasi penelitian bertempat di Puskesmas Pa'benteng Kabupaten Bantaeng, kegiatan yang akan saya lakukan dalam penelitian ini yaitu: melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. oleh karena itu, Puskesmas Pa'benteng Kabupaten Bantaeng ini adalah salah satu yang melaksanakan program terminal darah. Jenis penelitian yang akan diambil dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Tipe penelitian yang akan diambil dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif atau studi kasus. Penelitian deskriptif menuturkan dan menafsirkan data berkenaan dengan situasi yang terjadi atau kondisi antara fakta dan sebagainya. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu dari mana data dapat diperoleh dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 9 orang yang terdiri dari Kepala Dinas

Kesehatan, Kepala Puskesmas, Pelaksana dan Masyarakat. Teknik Pengumpulan Data yang dikumpulkan dari sampel yang sudah disiapkan sebelumnya, seperti Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Teknik Pengabsahan Data terdapat tiga bagian yaitu, Triangulasi sumber, Triangulasi Teknik dan Triangulasi Waktu. Sedangkan Teknik analisis data yaitu sebagai berikut: 1) Reduksi Data, Reduksi data merupakan proses penyempurnaan data, baik secara pengurangan terhadap data yang dianggap kurang penting maupun data yang tidak relevan, seperti penambahan data yang masih kurang. Data yang didapatkan dilapangan diambil dan disatukan untuk menjadi kesimpulan. 2) Penyajian Data, Penyajian data akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi selama penelitian berlangsung. Selain itu perlu adanya perencanaan kerja berdasarkan apa yang sudah dipahami. Maka dari itu penyajian data dalam proses pengumpulan informasi disusun berdasarkan data-data yang akan digunakan. 3) Penarikan kesimpulan, Dalam penarikan kesimpulan untuk langkah akhir tentunya harus mengambil tindakan dalam pertimbangan yang sudah dianalisis dengan baik supaya dalam pelaksanaan

kebijakan yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menyajikan data- data yang diperoleh selama penelitian yang sudah dilaksanakan pada Puskesmas Pa'benteng Kabupaten Bantaeng. Adapun pengertian implementasi adalah Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Peneliti akan memaparkan apa usaha yang dilakukan oleh Puskesmas Pa'benteng selaku pelaksana dan Dinas kesehatan selaku yang mengeluarkan kebijakan yang didapat melalui wawancara secara langsung dengan melihat bagaimana implementasi program terminal darah di puskesmas Pa'benteng Kabupaten Bantaeng.

Berkaitan data yang saya dapatkan dari puskesmas Pa'benteng mengenai angka kematian ibu di Indonesia cukup tinggi yaitu sekitar 4340 orang, sementara di Sulawesi selatan mencapai 156 orang dan terkhusus di kabupaten bantaeng sebanyak 1 orang. Penyebab terjadinya

kematian ibu adalah karena disebabkan pendarahan. maka dari itu dinas kesehatan kabupaten bantaeng mengeluarkan kebijakan mengenai terminal darah dan adapun maksud terminal darah itu adalah merupakan persinggahan darah sementara puskesmas untuk persediaan ibu melahirkan apabila kekurangan darah untuk menekan angka kematian ibu.

Oleh karena itu, implementasi program terminal darah pada penelitian ini dapat dilihat dari empat variabel menurut Edward III yaitu: 1. Komunikasi 2. Sumber daya 3. Disposisi 4. Struktur Birokrasi dan adapun hasil dari penelitian terkait implementasi program terminal darah di Puskesmas Pa'benteng Kabupaten Bantaeng sebagai berikut:

Komunikasi

Komunikasi merupakan salah-satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Komunikasi juga dapat diartikan sebagai suatu cara untuk mengsosialisasikan program kerja yang akan dilaksanakan ke masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui adanya program terminal darah agar

supaya bisa ikut berpartisipasi dalam program mengenai pelaksanaan terminal darah untuk persediaan darah ibu yang melahirkan yang sedang kekurangan darah. Maka dari itu mengenai teori komunikasi hal tersebut sesuai hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala dinas kesehatan kabupaten bantaeng yang mengemukakan bahwa; Dari hasil wawancara diatas oleh beberapa informan mengenai dapat disimpulkan bahwa pelaksana sudah melakukan tindakan sosialisasi tetapi sosialisasinya masih kurang kemasyarakat terutaman kepedesaan sehingga masih ada sebagian yang belum mengetahui secara jelas adanya terminal darah untuk persinggahan darah ibu yang sedang kekurangan darah. maka dari itu, diharapkan kedepanya pemerintah atau pelaksana harus lebih sering ke desa-desa untuk melakukan sosialisasi mengenai hadirnya program-program yang akan dilaksanakan termasuk program terminal darah ini, supaya masyarakat juga bisa mengetahui dan bisa ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan tentang adanya program yang akan dilaksanakan.

Sumber Daya

Sumber daya adalah suatu kebijakan yang meskipun telah di

komunikasikan supaya bisa jelas dan tepat waktu, tetapi apabila implementor (pelaksana) kekurangan sumber daya maka implementasi tidak bisa berjalan dengan efektif. Dan juga mengenai sumber daya manusia seperti sumber daya finansial dan kompetensi pelaksana.

Dengan demikian mengenai sumber daya terminal darah tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila masih kekurangan sumber daya baik secara finansial maupun kompetensi pelaksana maka dari itu kebijakan terminal darah akan berjalan dengan baik apabila keduanya terpenuhi yaitu mengenai sumber daya manusia dan sumber daya anggaran . Sumber daya manusia adalah salah satu faktor penting yang tidak dapat dilepaskan dari suatu organisasi. Sumber daya manusia merupakan sebuah kunci keberhasilan dan juga penentu berhasil atau tidaknya suatu kebijakan.

Mengenai beberapa pendapat informan dapat disimpulkan bahwa mengenai sumber daya anggaran sudah mencukupi akan tetapi yang masih jadi kendala karena belum adanya persediaan penyimpanan kulkas darah di Puskesmas Pa'bentengang. sehingga apabila sudah melakukan donor darah maka darah tersebut di bawah ke Unit Transfusi darah Rumah Sakit. dengan

demikian, mengenai sumber daya manusia juga belum cukup karena pihak pelaksana berharap lebih banyak yang ikut berpartisipasi lebih banyak pula pesediaan stok darah. maka dari itu, pelaksana harus lebih sering melakukan tindakan sosialisasi untuk memperjelas maksud dan tujuan dilaksanakannya terminal darah ini, agar supaya kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi lebih besar.

Disposisi/Sikap Pelaksana

Disposisi merupakan salah satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Maka dari itu disposisi juga merupakan sikap para pelaksana program terminal darah untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab yang telah diberikan demi mencapai suatu tujuan yang diharapkan. dari beberapa informan dapat disimpulkan bahwa pemerintah sangat mendorong, mendukung dan juga mensupport dengan hadirnya terminal darah ini. Dan juga adanya sikap dan komitmen pelaksana sehingga program terminal

darah tersebut bisa berjalan dengan baik. Dengan demikian mengenai ibu yang sudah pernah menggunakan donor darah yaitu sekitar 50 pasien selama dilaksanakannya terminal darah tersebut. Dan juga terkait pendonor itu pertahunya tidak menentu. Maka dari itu, masyarakat juga sangat bersyukur dengan hadirnya terminal darah tersebut karena apabila pada saat melahirkan dan sedang kekurangan darah, dia tidak khawatir lagi dan semoga program terminal darah ini tetap dijalankan, agar bisa membantu masyarakat yang membutuhkan dan bisa menekan angka kematian ibu di Kabupaten Bantaeng.

Struktur Birokrasi

Birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu. Mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures) atau SOP. Struktur birokrasi, merupakan suatu struktur organisasi yang mempunyai tugas dalam mengimplementasikan suatu program yang akan dilaksanakan yaitu, program terminal darah agar bisa tercapai sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, dapat

dipahami bahwa yang menfokuskan kepada pencapaian tujuan untuk mengetahui mengenai pelaksanaan terminal darah di Puskesmas Pa'bentengang Kabupaten Bantaeng.

Hasil wawancara informan penelitian yang dapat saya simpulkan mengenai struktur birokrasi, bahwa mengenai SOP dalam pelaksanaan terminal darah adalah semua yang berhubungan organisasi mempunyai SOP untuk dijadikan petunjuk teknis dalam proses tata kerja terminal darah. maka dari itu, sebelum di lakukanya donor darah terlebih dahulu dilakukan pendaftaran lalu pengecekan oleh si pendonor. setelah itu pendonor diambil darahnya dan dibawah ke Unit transfusi darah Rumah Sakit (UTDRS) untuk diperiksa dan memastikan darah tersebut bebas dari penyakit. dan disini juga terdapat permasalahan adalah mengenai masih kurangnya masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mendonorkan darahnya. Maka dari itu, semoga pemerintah bisa menjelaskan lebih dalam mengenai terminal darah ini agar masyarakat paham dan mau ikut berpartisipasi untuk mendonorkan darahnya secara sukarela. dan semoga kedepanya program terminal darah ini bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Hasil wawancara tentang indicator struktur birokrasi dari beberapa pendapat informan bahwa implementasi kebijakan Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan terminal darah di Puskesmas Pa'bentengang Kabupaten Bantaeng Salah satu diantaranya faktor yang sangat penting dan bisa dikatakan tidak dapat dilepaskan dari sebuah namanya organisasi baik, institusi maupun dari perusahaan. SDM juga dapat di artikan sebagai kunci yang bisa menentukan suatu perkembangan perusahaan pada umumnya suatu yang dipekerjakan disebuah organisasi sebagai penggerak pemikir dana atau pun perencana untuk mencapai suatu tujuan organisasi.

Faktor Pendukung

Faktor yang dapat membantu keberhasilan dalam pelaksanaan terminal darah di Puskesmas Pa'bentengang Kabupaten Bantaeng. Adapun faktor pendukung yang akan dikemukakan oleh salah satu informan yang mengarakan bahwa; Mengenai faktor pendukung, dengan adanya kerja sama dan komitmen oleh para terlibat dalam pelaksanaan terminal darah dan hadirnya terminal darah ini untuk membantu masyarakat, juga bisa menekan akan kematian ibu. Mengenai faktor pendukung semoga kerja sama

dan komitmen pelaksana bisa dijaga dan semoga program kebijakan terminal darah ini tetap berjalan untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai.

Faktor Penghambat

Faktor yang dapat mempengaruhi gagalnya suatu kebijakan dalam melaksanakan terminal darah di Puskesmas Pa'benteng Kabupaten Bantaeng. Adapun faktor yang menghambat berjalannya program terminal darah saat ini yang dikemukakan oleh selaku pelaksana ialah; untuk saat ini yang menjadi penghambat dalam melaksanakan terminal darah ini karena adanya Covid19 dan juga kurangnya masyarakat yang mau ikut mendonorkan darahnya dan program terminal darah ini sudah berjalan 3 tahun dari sejak tahun 2017 sampai sekarang ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas yang berjudul Implementasi program 'Terminal Darah' di Puskesmas Pa'benteng Kabupaten Bantaeng yang dapat disimpulkan dari beberapa informan sebagai berikut: 1) Komunikasi adalah suatu keberhasilan implementasi kebijakan dalam masyarakat supaya implementor bisa

mengetahui apa yang seharusnya bisa dilakukan, maka dari itu yang menjadi tujuan dan sasaran dalam suatu kebijakan harus ditransmisikan kepada target atau kelompok sasaran dengan cara mengsosialisasikan suatu program yang akan dilaksanakan. Maka dari itu mengenai terminal darah ini, pelaksana sudah melakukan tindakan sosialisasi akan tetapi tindakan sosialisasinya masih kurang kemasyarakat, sehingga masyarakat masih ada sebagian belum mengetahui hadirnya terminal darah ini. 2) Sumber daya adalah suatu kebijakan yang meskipun telah dikomunikasikan supaya bisa jelas dan tepat waktu, tetapi apabila implementor (pelaksana) kekurangan sumber daya maka implementasi tidak bisa berjalan dengan efektif. Maka dari itu mengenai sumber daya manusia seperti sumber daya finansial Puskesmas Pa'benteng sudah memenuhi, kemudian sebelum pengambilan darah terlebih dahulu dilakukan pengecekan untuk memastikan bahwa pendonor layak untuk mendonorkan darahnya. 3) Disposisi adalah salah satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat

kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Maka dari itu, mengenai hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah dan masyarakat sangat mendukung penuh mengenai hadirnya terminal darah ini. karena sangat membantu bagi ibu yang melahirkan apabila sedang kekurangan darah dan masyarakat juga berharap, terminal darah ini tetap dijalankan agar supaya bisa membantu menekan angka kematian ibu di Kabupaten Bantaeng. 4) Struktur Birokrasi Birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu. Mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures) atau SOP. Struktur birokrasi merupakan suatu struktur organisasi yang mempunyai tugas dan mekanisme dalam mengimplementasikan suatu program yang akan dilaksanakan yaitu, program terminal darah agar bisa tercapai sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Maka dari itu dari hasil kesimpulan diatas mengenai mekanisme kerjanya terlebih dahulu dilakukan pengecekan untuk memastikan bahwa pendonor bisa

mendonorkan darahnya dan komitmen para pelaksana akan tetap bisa mereka jaga dan tetap dilaksanakan terminal darah ini sesuai tugas dan fungsi yang telah diberikan masing-masing. 5) Faktor pendukung yaitu karena pemerintah dan masyarakat sangat mendukung dengan hadirnya terminal darah ini dan juga adanya pendonor darah tetap. mengenai anggaran dalam terminal darah juga sudah mencukupi dan ini sangat menentukan untuk suatu keberhasilan dalam menjalankan terminal darah tersebut. 6) Faktor penghambat yaitu karena kurangnya sosialisasi kemasyarakatan, kurangnya kesadaran masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pendonoran darah sehingga pendonor masih kurang dan juga yang menjadi penghambat karena adanya masa covid 19.

DAFTAR PUSTAKA

- Aneta, A. (2010). Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo. *Jurnal Administrasi Publik, Volume 1* (1), Halaman 54-65.
- Agustino, L. (2006). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: AFABETA.
- Burhanuddin, Y. (1998). *Administrasi Pendidikan*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA.
- Creswell, J. W. (2013). *Research Design Pendekatan Kualitatif*,

- Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dewi, R. R. K., Martha. I. K., & Atik. M. (2016) "Analisis Kebijakan Donor Darah Di Unit Donor Darah (UDD PMI) Kota Pontianak". *Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia, Volume 4* (2), Halaman 109-117.
- Edward III, George C. (1980). *Implementing Publik Policy*. Washington, DC, *Congressional Quarterly Press*.
<https://makassar.tribunnews.com/amp/2017/07/10/terminal-darah-bantaeng-sudah-miliki-150-pondonor-tetap>.
<https://berita.news/2019/06/13/inovasi-terminal-darah-jamin-ketersediaan-stok-darah-dibantaeng/>
- Imron, A. (2013). "Implementasi Kebijakan Kesehatan "LIBAS 2+" Sebagai Upaya Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi di Kabupaten Sampang". *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia, Volume 2* (3), Halaman 107-111.
- Kurniasih, A. P. (2016). *Implementasi Pelaksanaan Program Perencanaan Persalinan Dan Pencegahan Komplikasi (P4K) Dalam Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB) di Puskesmas Madukara 2 Kabupaten Banjarnegara (Skripsi)*. Universitas Negeri Semarang, Semarang.
- Machsunah, U., & Subhan. (2018). "Implmentasi CSR Melalui Program Donor Darah Oleh PT Indomarco Prismatama Cabang Cirebon". *Jurnal Ilmu Komunikasi, JIKE Volume 1* (2), Halaman 189-211.
- Mulyadi, D. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: ALFABETA.
- Mustari, N. (2013). *Implementasi Kebijakan Publik*. Yokyakarta: MEMBUMI PUBLISHING.
- Mustari, N. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik*. Yokyakarta: Leutikaprio.
- Nugroho, R. (2006). *Kebijakan Publik Untuk Negara-negara Berkembang*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Parawangi, A. (2011). *Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pengembangan Insfrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah Di Kabupaten Bone)*. (Tesis). Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar.
- Purwanto. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gava Media..
- Salusu. (2002). *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik & Organisasi Non Profir*. Jakarta: Gramedia.
- Subarsono. (2010). *Analisis Kebijakan Publik*. Yokyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Suratman, (2017). *Generasi Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surabaya: CAPIYA PUBLHISING.
- Winarno, B. (2011). *Kebijakan Publik (Teori, Proses Dan Studi Kasus)*. Yogyakarta:CAPS.